



18 Anak Korban Daycare Alami Masalah Gizi

Tim Hukum Terima Kuasa 125 Ortu

YOGYA (KR) - Tim Hukum Peduli Anak Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima kuasa hukum dari 125 orangtua yang anak-anak mereka menjadi korban kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta yang digerebek aparat Kepolisian akhir April lalu.

"Sampai saat ini terdapat 125 orangtua korban yang memberi kuasa hukum kepada Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Silvi Dewajani di Yogyakarta, Selasa (19/5).

Menurut Silvi, atas permohonan kuasa hukum tersebut, Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta akan memberikan pendampingan secara pro bono

atau gratis bagi para orangtua dan korban daycare hingga kasusnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. "Dan hari ini, Selasa (19/5), Tim Hukum ke Polresta (Kepolisian Resor Kota) Yogyakarta menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan berkoordinasi untuk melakukan langkah hukum selanjutnya," katanya.

Silvi mengatakan, Tim Hukum yang dibentuk Pemkot Yogyakarta dan bersinergi dengan relawan

advokat lintas organisasi ini berkomitmen untuk memastikan keadilan dan pemenuhan hak bagi seluruh anak korban. "Ada tiga poin yang jadi fokus Tim Hukum, yaitu pertanggungjawaban hukum para pelaku secara personal, kemudian pertanggungjawaban hukum badan yayasannya melalui pertanggungjawaban korporasi, dan pemenuhan hak restitusi bagi para korban," katanya.

Dalam memperjuangkan fokus itu, Tim Hukum terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan lain lain, terkait pasal yang disangkakan termasuk barang bukti dan lain sebagainya.

* Bersambung hal 9 kol 1

“Tim Hukum juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dukungan pemenuhan hak restitusi para korban,” katanya.

Pemkot Yogyakarta telah melakukan skrining pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak-anak korban kekerasan dan penelantaran yang terjadi di Daycare Little Aresha dan menemukan 18 anak mengalami masalah gizi. “Dari 149 anak yang menjalani skrining pertumbuhan, ditemukan 18 anak mengalami masalah gizi pada tahapan berat badan kurang dan gizi kurang,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Aan Iswanti.

Menurutnya, sebanyak 18 anak yang mengalami suatu kondisi tahap awal kekurangan gizi

harus diintervensi ke Puskesmas setempat. “Terhadap 18 anak tersebut dilakukan rujukan ke Puskesmas untuk validasi status gizinya oleh Tim Asuhan Gizi Puskesmas, dan sembilan anak telah ke Puskesmas,” katanya.

Skrining pertumbuhan pada anak peserta daycare dilakukan Dinkes Yogyakarta, bersama Puskesmas, UPT Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Yogyakarta.

Selain pertumbuhan, kata Aan, skrining perkembangan pada anak korban daycare juga dilakukan Pemkot Yogyakarta sebagai upaya pemantauan awal terhadap kondisi kesehatan dan tumbuh

kembang anak secara menyeluruh.

“Dari 153 anak yang menjalani skrining perkembangan, hasil pemeriksaan menunjukkan 12 anak mengalami penyimpangan perkembangan, 19 anak dalam kategori meragukan, dan 122 anak berada dalam perkembangan normal,” katanya.

Menurutnya, skrining perkembangan anak dilakukan oleh psikolog klinis untuk memastikan perkembangan balita sesuai dengan usianya berdasarkan pedoman SDIDTK atau Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang. “Intervensinya 12 anak dan 19 anak dilakukan rujukan dan kunjungan ulang ke Puskesmas untuk pemeriksaan perkembangan secara komprehensif. Dan sembilan anak telah ke Puskesmas,” kata Aan Iswanti. **(Ant)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005